JELANG LAUNCHING MPP TANJUNGPINANG, INI HARAPAN OMBUDSMAN KEPRI

Selasa, 23 Agustus 2022 - Reihana Ferdian

BATAM - Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepulauan Riau, Lagat Siadari berharap agar Mal Pelayanan Publik (MPP) yang akan segera hadir di Kota Tanjungpinang dapat menyiasati keruwetan pelayanan publik.Â Pasalnya, ia katakan, di beberapa MPP yang sudah terlebih dahulu ada, jangka waktu penyelesaian produk layanan acap kali malah molor akibat *back office* tidak berada di satu gedung yang sama.

"Oleh karena itu perlu adanya komitmen dan pengawasan secara berkala oleh instansi terkait. Jangan namanya saja MPP, tapi sama saja ribetnya," ucapnya saat melakukan Dialog dengan RRI Tanjungpinang Senin (22/08/2022).

Hal lain yang menjadi perhatian Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepulauan Riau ialah pungutan liar yang menurutnya merupakan penyakit pelayanan publik.

"Jika sebelumnya pungli pernah terjadi di Organisasi Perangkat Daerah Teknis, maka jangan nanti dibawa ke MPP. Harus *clean* and *clear*," tegas Lagat.

Ia mengatakan pihaknya akan turut hadir pada MPP Tanjungpinang, membuka penerimaan konsultasi dan pengaduan masyarakat terkait pelayanan publik sekaligus mengawasi penyelanggara di sana.

"Seumpama menyelam sambil minum air, kami akan mengawasi, bukan mencari-cari kesalahan, justru membuat penyelenggara di sana jadi profesional dan berintegritas. Dimana jika 2 nilai itu tidak ada, orang akan bilang sama saja," katanya.

Lagat berharap Pemerintah Tanjungpinang berhasil dalam menjalankan MPP sehingga dapat mendongkrak citra Tanjungpinang sebagai ibukota Provinsi di mata masyarakat nasional.

"Investor akan tertarik bila melihat tren birokrasi yang samakin baik. Jadi berdampak paralel dengan pertumbuhan ekonomi," ujar Lagat menutup.Â